

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan limpahan-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan merupakan Laporan progres realisasi target maupun indikator SKPD melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun berjalan.

Laporan kinerja Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam melaksanakan tugasnya. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan capaian kinerja ini dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja semua gerak, pikiran, dan aktivitas jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran periode selanjutnya nanti.

Kandangan, Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199103 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PERNYATAAN REVIU.....	2
IKHTISAR.....	3
BAB I : PENDAHULUAN.....	5
1.1. TUGAS DAN FUNGSI	5
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN	6
1.3. PERAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	8
1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. RENCANA STRATEGI	10
2.2. PERJANJIAN KINERJA 2025	12
2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. PENGUKURAN KINERJA	23
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS	27
3.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	59
3.4. REALISASI ANGGARAN SEBELUMNYA	66
BAB IV : PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Murni Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Murni Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	14
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	15
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	16
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025	17
Tabel 2.8 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	19
Tabel 3.1 Indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	23
Tabel 3.2 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ...	25
Tabel 3.4 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan Kabupaten Sekitar	27
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025	28
Tabel 3.6 Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya	29
Tabel 3.7 Program Pendukung Capaian Kinerja	32
Tabel 3.8 Pemetaan Penempatan Petugas Pam Jalur Tahun 2025	33
Tabel 3.9 Pemeliharaan rambu rusak berat tahun 2025	37
Tabel 3.10 Pemeliharaan rambu rusak ringan tahun 2025	37
Tabel 3.11 Pemeliharaan Traffic Light tahun 2025	39
Tabel 3.12 Pemeliharaan Warning Light tahun 2025	39
Tabel 3.13 Pengadaan rambu baru tahun 2025	40
Tabel 3.14 Efisiensi per sasaran	45
Tabel 3.15 Capaian Indikator Sasaran	47

Tabel 3.16 Rekap Jumlah Penumpang Bus Sekolah Layanan Dinas
Perhubungan 48

Tabel 3.17 Rekap Jumlah Penumpang Bus Sekolah Layanan Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan 49

Tabel 3.18 Rekap Jumlah Penumpang Trayek Angkutan Desa Kab. HSS 50

Tabel 3.19 Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra 51

Tabel 3.20 Program Pendukung Capaian Kinerja 54

Tabel 3.21 Efisiensi per sasaran 56

Tabel 3.22 Meningkatnya kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah 57

Tabel 3.23 Matriks Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Akip Internal
Tahun 2024 60

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 67



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Publikasi IKM Dinas Perhubungan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Semester II Tahun 2025 26

Grafik 3.2 Target Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025 70



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	7
Gambar 3.1 Publikasi IKM Dinas Perhubungan Kabupaten HSS Semester II Tahun 2024	19
Gambar 3.2 Kegiatan saat perhitung V/C Rasio	31
Gambar 3.3 Kegiatan Pam Jalur Rutin dan Khusus Tahun 2025	35
Gambar 3.4 Koordinasi Terkait Pengelolaan Parkir	36
Gambar 3.5 Kegiatan Razia Gabungan Tahun 2025	42
Gambar 3.6 Layanan Penyeberangan Sungai dan Danau Tahun 2025 ...	43
Gambar 3.7 Layanan Kepelabuhan	44
Gambar 3.8 Kegiatan Layanan Bus Sekolah Gratis	53
Gambar 3.9 Kegiatan Pemeliharaan Terminal	55



****PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT
XXX**



IKHTISAR EKSEKUTIF

XXX

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2025 memiliki tiga sasaran strategis dengan total tiga indikator kinerja, dan tiga target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap Tiga target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target; dan

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masingmasing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61	0,61	100%
2	Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%	56,21%	100,05%
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar **Rp6.194.568.049,-** atau 78,52% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu **Rp7.888.632.619,-**

Capaian kinerja Dinas Perhubungan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berpedoman pada tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Semua indikator dan target SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Renstra Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelaksanaan program dan kegiatan selalu sejalan dengan RENSTRA SKPD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib pemerintahan bidang Perhubungan. Untuk Tugas Dinas Perhubungan sesuai yang tertera pada pasal 33 ayat (1) adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yang tertera pada pasal 33 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
perumusan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;

- d. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen transportasi dan keselamatan teknik sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

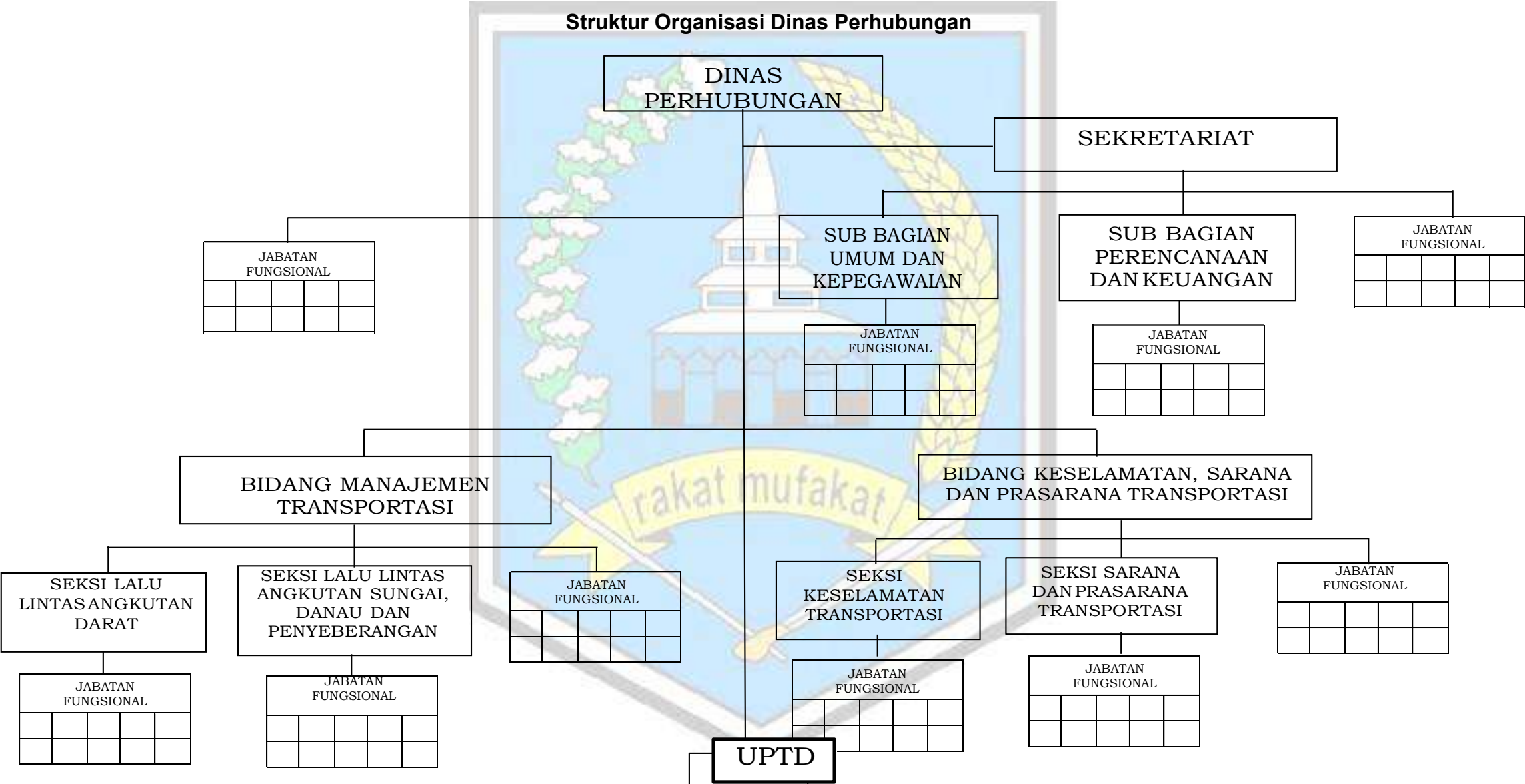
- a. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Manajemen Transportasi:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat; dan
 - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- c. Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Transportasi:
 - 1) Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Secara rinci Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021

1.3. PERAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Berpedoman pada tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya **Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat** dengan isu strategis masih rendahnya kepuasan layanan Pelayanan Publik, ini berarti layanan publik masih perlu ditingkatkan baik dari segi sarana prasarana maupun kompetensi petugas layanan. Peran Dinas perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelayanan publik disini yaitu dengan penyediaan layanan dan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana Prasarana Jalan, mulai dari Rambu Jalan, Cermin Tikungan, Marka Jalan, Pita Getar/Marka Getar, *Water/Road Barrier*, *ZOSS*, *Traffict Light*, *Flashing Light*, Halte.
2. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Layanan Bus Sekolah Gratis
4. Layanan Kepelabuhanan
5. Layanan Kapal Penyeberangan Sungai dan Danau Gratis
6. Pengamanan Jalur Rutin dan pada Kegiatan Khusus.
7. Penyediaan Lokasi Parkir yang pengelolaannya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
8. Layanan Terminal

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perhubungan pada 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak ruas jalan kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum ada layanan maupun sarana dan prasarana dari Dinas Perhubungan.
2. Masih banyak Kendaraan Pengangkut orang dan barang yang belum Laik jalan baik dari kelengkapan dan kondisi kendaraan maupun tingkat emisi gas buangnya.
3. Masih Rendahnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.
4. Masih Rendahnya Layanan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah/perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Goverment*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. TUGAS DAN FUNGSI
- B. ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
- C. PERAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
- D. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGI
- B. PERJANJIAN KINERJA 2025
- C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN KINERJA
- B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. REALISASI ANGGARAN SEBELUMNYA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029).

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dari tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan sebagai hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja yang ada. Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan

No	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. HSS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	target
1.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61 Indeks
		Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%
2.	Meningkatnya Kualitas RB General	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program Dinas Perhubungan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja (PK) Murni Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkannya Kinerja Lalu Linta Kabupaten	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Jalan	Persentase Kinerja Angkutan Jalan	66,56%
No	Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.1.877.801.592,00	
2.	Program Pelayaran	Rp.465.062.800,00	

Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Pj. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 merupakan komitmen dalam mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan transportasi darat, khususnya pada aspek lalu lintas jalan kabupaten serta pelayanan angkutan jalan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengendalian, evaluasi, serta dasar akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini mencerminkan fokus strategis Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan. Pencapaian target kinerja memerlukan dukungan perencanaan yang matang, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor. Evaluasi berkala terhadap indikator

menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Murni Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkannya Kinerja Lalu Linta Kabupaten	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Jalan	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	66,56%
3.	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.1.877.801.592,00
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.465.062.800,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.682.609.547,00

Selanjutnya kembali dibuat Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 yang baru dilantik pada bulan Februari Tahun 2025.

Tabel 2.5
 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
 Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61 Indeks
2	Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%
3.	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.897.843.842,00
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 399.362.800,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.591.425.977,00

Perjanjian Kinerja Perubahan antara Plt. Kepala Dinas Perhubungan dengan Bupati dilakukan sebagai bentuk penyesuaian target dan fokus kinerja berdasarkan kondisi pelaksanaan program serta dinamika kebutuhan pelayanan

transportasi di daerah. Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tetap realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61 Indeks
2	Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%
3.	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.897.843.842,00
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 399.362.800,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.591.425.977,00

Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan kepada

Kepala Dinas definitif. Penyesuaian ini merupakan bentuk keberlanjutan komitmen kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi sesuai tugas dan fungsi organisasi.

2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka disusun Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	Indeks rata-rata kinerja ruas jalan adalah ukuran kemampuan ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas. Indeks ini didapatkan dari hasil analisis parameter-parameter tertentu. parameter yg dipilih adalah Analisa VC ratio atau Volume Capacity Ratio. Trend VC Ratio selalu meningkat setiap tahunnya karena peningkatan penggunaan kendaraan pribadi baik dalam maupun luar daerah, dengan dilaksankannya Program dan Kebijakan oleh Dinas Perhubungan diupayakan dapat mencegah peningkatan Indeks VC Ratio pada ruas jalan yang menjadi sampel. untuk V/C Ratio ruas jalan yang dipilih untuk perhitungan rata-rata digunakan 10 ruas jalan dengan ferforma terburuk dari 30 Ruas jalan yang menjadi sampel pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 IKK Outcome Urusan Perhubungan V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rumus rata-rata V/C ratio adalah sebagai berikut : $\bar{x}V/\bar{x}C$

2.	Meningkatnya Layanan Angkutan Jalan	Persentase Kinerja Angkutan Jalan	Kinerja angkutan jalan adalah kemampuan angkutan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas dapat juga diartikan sebagai hasil kerja angkutan dalam melayani penumpang. Dengan dilaksankannya Program dan Kebijakan oleh Dinas Perhubungan serta kerjasama lintas sektor dengan ORGANDA dan OPD terkait dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan pelajar dan angkutan desa, Jumlah penumpang yang menjadi angka perhitungan adalah penumpang angkutan bus sekolah layanan Dinas Perhubungan Kab. HSS (2 unit) dan Bus sekolah layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS (3 unit), angkutan trayek berupa angkutan desa yang masih aktif beroperasi (1 unit) dengan perhitungan sebagai berikut : Kinerja Angkutan Jalan % = Jumlah Penumpang yang diangkut dibagi kapasitas maksimum angkut kendaraan dikali 100 % untuk layanan Angkutan Pariwisata yang bekerjasama dengan Pemkab belum tersedianya di Kab. HSS
----	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Sumber Data : IKU Dinas Perhubungan Kab. HSS

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yang telah disusun, maka Dinas Perhubungan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
PROGRAM :PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	1.877.801.592	1.897.843.842
KEGIATAN :penetapan rencana induk jaringan llaj kabupatenkota	63.974.500	63.974.500
SUB KEGIATAN : Sub Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupatenkota	63.974.500	63.974.500
KEGIATAN :penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatenkota	510.205.200	497.875.200
SUB KEGIATAN :penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatenkota	58.840.200	43.690.200
SUB KEGIATAN :rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	451.365.000	454.185.000
KEGIATAN :pengelolaan terminal penumpang tipe c	-	25.900.000
SUB KEGIATAN : Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	25.900.000
KEGIATAN :penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	134.419.472	134.419.472
SUB KEGIATAN :fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupatenkota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	134.419.472	134.419.472
KEGIATAN :pengujian berkala kendaraan bermotor	259.885.750	183.858.000
SUB KEGIATAN :penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	170.885.750	94.858.000
SUB KEGIATAN :pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	75.000.000	75.000.000
SUB KEGIATAN :monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	14.000.000	14.000.000
KEGIATAN :pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu	588.524.670	671.024.670

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
lintas untuk jaringan jalan kabupatenkota		
SUB KEGIATAN :forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupatenkota	40.188.670	122.688.670
SUB KEGIATAN :penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupatenkota	548.336.000	548.336.000
KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.792.000	320.792.000
SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.792.000	320.792.000
PROGRAM :PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	465.062.800	399.362.800
KEGIATAN :pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	465.062.800	399.362.800
SUB KEGIATAN :pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	465.062.800	399.362.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis.

Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Berikut disampaikan analisis terhadap tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tujuan	Indikator
Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi pada capaian RPJMD yaitu pada Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi yang Memberikan Kenyamanan dan Kepuasan Kepada Masyarakat. Capaian indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	93	90,53	97,34%

Sumber : Publikasi IKM Dinas Perhubungan Semester II Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah **Sangat Tinggi** namun predikat capaian **Belum Sesuai Target** 100 % yaitu hanya mencapai sebesar 97,34 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan masih perlu ditingkatkan.

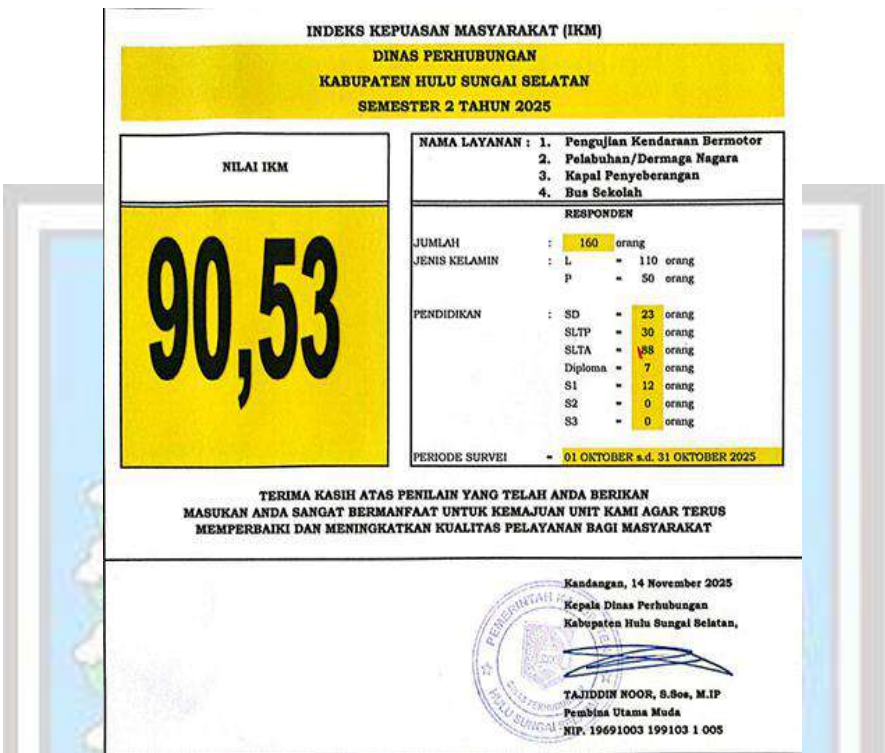
Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya kualitas pelayanan pada beberapa unit layanan, serta adanya keluhan masyarakat terkait waktu pelayanan dan kenyamanan fasilitas. Selain itu, faktor eksternal seperti peningkatan volume pengguna jasa transportasi dan kondisi operasional di lapangan juga turut mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi fasilitas pendukung, peningkatan kompetensi petugas layanan, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap standar pelayanan minimal agar target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode Semester II Tahun 2025 terhadap seluruh bidang Pelayanan dengan mengedarkan kuesioner kepada Responden yang menjadi pelanggan unit pelayanan. Publikasi IKM tersebut dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Publikasi IKM Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Semester II Tahun 2025



Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perhubungan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2021 s.d 2025

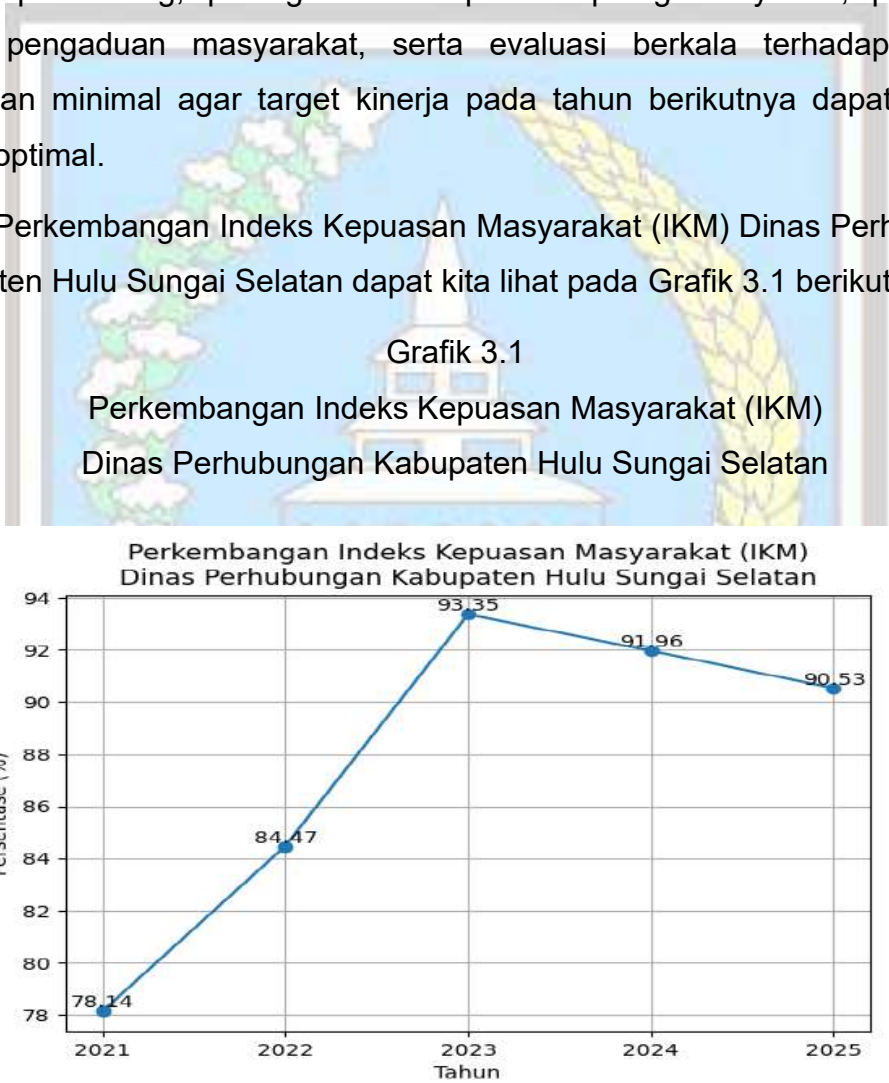
No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,14	84,47	93,35	91,96	90,53

Sumber Data : Publikasi IKM Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuasi namun tetap menunjukan trend yang positif dari periode awal. Pada periode 2024 s.d 2025

IKM mengalami penurunan dari 91,96 turun menjadi 90,53 meskipun penurunan tersebut tidak signifikan, penurunan ini disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap petugas pelayanan angkutan yang ada di Dinas Perhubungan. Untuk periode Renstra 2025-2029 target awal Renstra Tahun 2025 sebesar 93 dengan target Akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 95 yang berarti target tahun awal **belum tercapai** sehingga harus terus upaya perbaikan ke depan, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi fasilitas pendukung, peningkatan kompetensi petugas layanan, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap standar pelayanan minimal agar target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat kita lihat pada Grafik 3.1 berikut ini :



Sumber Data : Publikasi IKM Dinas Perhubungan

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekitar dapat dilihat pada tabel 3.5 dan grafik 3.1 berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Perhubungan Kabupaten Sekitar

No	Instansi	Nilai IKM Tahun 2025
1	DISHUB Kab. Hulu Sungai Selatan	90,53
2	DISHUB Kab. Balangan	84,75
3	DISHUB Kab. Hulu Sungai Tengah	92,11
4	DISHUB Kab. Tabalong	87,49
5	DISHUB Kab. Banjar	87,60

Sumber : Dinas Perhubungan

Dapat dilihat pada Tabel 3.5 menunjukan Nilai IKM Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan **tertinggi kedua** setelah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan selisih nilai 1,58.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan secara rutin setiap tahunnya agar tetap berfungsi dengan baik,
2. Menerapkan teknologi informasi pada layanan yang disediakan Dinas Perhubungan
3. Mengevaluasi kinerja layanan secara berkala setiap semesternya.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan

Capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61	0,61	100%

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas dipaparkan Capaian dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan; dimana capaian sasaran Strategis 1 yaitu **Meningkatnya Kelancaran Arus Lalu Lintas Melalui Optimalisasi Kinerja Jaringan Jalan** tercapai dengan predikat capaian **Sesuai Target** yaitu sebesar **100%**. Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 ruas jalan sampel target indeks rata-rata kinerja ruas jalan yang dikaji, diperoleh nilai rata-rata V/C Ratio sebesar 0,61. Nilai tersebut sesuai dengan target tahunan Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan sebesar 0,61, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas ruas jalan di wilayah kajian masih berada dalam kondisi terkendali dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

a. Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2024 nilai Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan tercatat sebesar 0,60, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,61. Meskipun secara angka terjadi kenaikan sebesar 0,01, nilai tersebut masih berada dalam kategori terkendali dan sesuai dengan batas target kinerja yang telah ditetapkan. Kenaikan ini menunjukkan adanya dinamika volume lalu lintas yang relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap mampu dikelola melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum kondisi kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga dan stabil, serta mencerminkan konsistensi upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai sasaran perencanaan.

Tabel 3.6

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,60 Indeks	0,61 Indeks	100,01%

b. Perbandingan Dengan Target Akhir Rentra Tahun 2029

Tabel 3.7

Perbandingan Dengan Target Akhir Rentra Tahun 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target tahun akhir renstra 2029
Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0,61 Indeks	0,61 Indeks	0,63 Indeks

Untuk mencapai target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 0,63 pada Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan, diperlukan penguatan strategi optimalisasi jaringan jalan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Meskipun capaian tahun 2025 telah berada pada angka 0,61 dan sesuai target tahunan, peningkatan hingga 0,63 memerlukan langkah-langkah konkret seperti intensifikasi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan, pengaturan simpang melalui optimalisasi waktu siklus APILL, penertiban parkir di badan jalan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran yang berpotensi menurunkan kapasitas jalan.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

1. Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui pengaturan simpang, evaluasi waktu siklus APILL, serta penanganan titik rawan kemacetan sehingga kapasitas jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2. Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas yang Konsisten, termasuk penertiban parkir di badan jalan dan kendaraan yang melanggar ketentuan,

sehingga hambatan samping dapat diminimalkan dan arus lalu lintas lebih lancar.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung, seperti perbaikan marka jalan, rambu lalu lintas, serta fasilitas keselamatan jalan yang mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.
4. Koordinasi Lintas Sektor yang Efektif, baik dengan instansi teknis terkait maupun aparat penegak hukum, sehingga kebijakan transportasi dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
5. Evaluasi dan Monitoring Berbasis Data (V/C Ratio) yang dilakukan secara berkala pada ruas-ruas prioritas, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika volume lalu lintas.
6. Komitmen dan Konsistensi Pelaksanaan Program, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Peningkatan Volume Kendaraan yang Signifikan, seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, sehingga menambah beban lalu lintas pada ruas-ruas jalan utama dan berpotensi meningkatkan nilai V/C Ratio.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, baik dalam hal pengadaan sarana prasarana lalu lintas maupun pemeliharaan rutin fasilitas pendukung seperti rambu, marka, dan APILL.
3. Disiplin Pengguna Jalan yang Masih Rendah, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan gangguan arus dan menurunkan tingkat pelayanan jalan.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin V/C Ratio pada ruas-ruas prioritas setiap periode tertentu guna mendeteksi potensi penurunan tingkat pelayanan sejak dini.
2. Mempertahankan dan mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, khususnya pada simpang bersinyal dan titik rawan kemacetan, melalui penyesuaian waktu siklus APILL serta pengaturan arus kendaraan pada jam sibuk.

- 3. Melakukan pemeliharaan berkala sarana dan prasarana lalu lintas, seperti rambu, marka, dan fasilitas keselamatan jalan agar tetap berfungsi optimal dan mendukung kelancaran arus.
- 4. Memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengaturan tata ruang dan pengendalian pembangunan kawasan agar tidak menimbulkan beban lalu lintas berlebih pada ruas tertentu.

Gambar 3.2.

Kegiatan saat perhitung V/C Rasio pada titik jalan yang telah ditentukan



PROGAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN

Untuk mendukung Sasaran Kinerja “Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pelayaran. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.7 Program Pendukung Capaian Kinerja				
Program Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya efektivitas penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi darat	Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai standar	67,14%	67,14%	100%
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	0,8%	0,8%	100%
Meningkatnya kepatuhan dan kelayakan operasional kendaraan dalam mendukung keselamatan transportasi	Persentase kendaraan laik jalan	100%	100%	100%
PROGRAM PELAYARAN				
Meningkatnya keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi sungai dan danau	Persentase Sarana Prasarana Transportasi sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan minimal	40%	40%	100%

KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN SASARAN

1. Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui Pam Jalur pada titik rawan kemacetan.

Kegiatan ini dilaksanakan karena di beberapa titik tersebut sangat diperlukan Pengaturan, Penjagaan oleh Personil Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan mengalami kepadatan lalu lintas pada jam sibuk yang dialami oleh masyarakat umum dan pelajar selain kondisi jalan yang belum bisa dilakukan pelebaran , berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan melakukan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas di 26 titik pantau, jam sibuk yang dimaksud pada hari kerja ataupun acara khusus. Pelaksanaan kegiatan ini Selain untuk mengurangi dan pengaturan kepadatan lalu lintas agar berjalan lancar dan menghindari terjadinya kecelakaan, kegiatan ini juga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan aktivitas penting lainnya.

Data lokasi Titik Pantau yang dilaksanakan Penjagaan dan pengaturan lalu lintas dapat dilihat pada tabel 3.2.4 berikut ini :

Tabel 3.8
Pemetaan Penempatan Petugas Pam Jalur Tahun 2025
Dilengkapi Dengan CCTV Wilayah Kab. HSS

No	Lokasi	Status
1	Jl. Jend. Sudirman SMAN 1 KDG	Padat lalu lintas jalur sekolah
2	Jl. Bukhari Simpang 3 Amawang	Padat lalu lintas jalur sekolah
3	Jl.Kol. Sugiono Mesjid Al Minnah	Padat lalu lintas jalur sekolah
4	Jl. Jend. A. Yani Simpang Lima (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
5	Jl. Pahlawan Kampung Sholawat	Padat lalu lintas jalur sekolah
6	Jl. Jend. A. Yani Parincahan Pasar Banyu Barau	Padat lalu lintas jalur sekolah
7	Jl. Jend. A. Yani Parincahan Tengah Baiturrahim	Padat lalu lintas jalur sekolah
8	Jl. Jend. A. Yani Parincahan Tengah SDIT QA	Padat lalu lintas jalur sekolah
9	Jl. Jend. A. Yani Simpang Tiga Gambah (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
10	Jl. Jend. A. Yani Muara Sangkuang (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
11	Jl. S. Parman Durian Sumur (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah

No	Lokasi	Status
12	Jl. Al Falah Bypass Bilui	Padat lalu lintas jalur sekolah
13	Jl. Al Falah Bypass Muara Banta (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
14	Jl. Melati Simpang Tiga Nusa Indah	Padat lalu lintas jalur sekolah
15	Jl. H.M.YUSI Bundaran Ketupat Kecil	Lintas Nasional
16	Jl. Panglima Batur SMPN 1 KDG	Padat lalu lintas jalur sekolah
17	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Jl. Murni	Padat lalu lintas jalur sekolah
18	Jl. Jend. Sudirman Simpang 4 Yonif (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
19	Jl. Jend. A. Yani Bundaran Dodol (CCTV)	Padat lalu lintas jalur sekolah
20	Jl. Jend. Sudirman Bundaran Ketupat Besar (CCTV)	Lintas Nasional
21	Jl. Piere Tendean Loklua	Padat lalu lintas jalur sekolah
22	Jl. DI. Panjaitan	Padat lalu lintas jalur sekolah
23	Jl. Katamso	Padat lalu lintas jalur sekolah
24	Jl. A. Yani Pasar Bagambir	Padat lalu lintas jalur sekolah
25	Jl. Jend. A Yani Muara Gambah	Padat lalu lintas jalur sekolah
26	Jl. Jend. A. Yani Simpang Lima	Padat lalu lintas jalur sekolah

Sumber Data : Dinas Perhubungan dan <https://cctv.hulusungaiselatankab.go.id/>

Gambar 3.3
Kegiatan Pam Jalur Rutin dan Khusus Tahun 2025



2. Pengelolaan dan Perizinan Parkir di wilayah kab. HSS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir yang sesuai dengan tata ruang dan analisis dampak lalu lintas, terkait lokasi parkir wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Lokasi Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum. Berikut ini adalah kawasan parkir yang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. HSS :

Tempat Khusus Parkir :

- 1) Terminal Bis HM. Yusi Kandangan
- 2) Kawasan Wisata Loksado
- 3) Kawasan Stadion Olah Raga 2 Desember Kandangan.

Parkir Tepi Jalan Umum :

- 1) Tepi jalan umum di seberang kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. HSS
- 2) Tepi jalan umum di samping kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. HSS
- 3) Tepi jalan umum di Jl. Pemuda Kandangan (depan kandang tv)

- 4) Tepi jalan umum di depan Gedung MTQ Kandangan, Jl. Rahmah Bahrani Kandangan
- 5) Tepi jalan umum di depan Pasar Banyu Barau, Parincan Kandangan
- 6) Tepi Jalan Umum Di Depan Taman Palidangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan rapat koordinasi bersama petugas parkir untuk membahas pengelolaan parkir yang lebih tertib dan efisien. Dalam pertemuan ini, disampaikan evaluasi kinerja, penyampaian aturan yang berlaku, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil rapat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir, peningkatan kedisiplinan petugas, serta upaya penataan parkir yang lebih baik guna menciptakan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Gambar 3.4
Koordinasi Terkait Pengelolaan Parkir



3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung, seperti perbaikan marka jalan, rambu lalu lintas, serta fasilitas keselamatan jalan yang mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

- Pemeliharaan rambu rusak berat tahun 2025

Tabel 3.9

Jenis Pemeliharaan Rambu	Lokasi Koordinat	Foto Sampel
Rambu Penyeberangan	'-2.38'4,30044', 115.16,18128'E Desa Tumbukan Banyu	
Rambu Banyak Anak	'-2.38'4,3188', 115.6'16,35804'E Desa Tumbukan Banyu	
Rambu Tempat Penyeberangan	'-2.38'4,3188', 115.6'16,35804'E Desa Tumbukan Banyu	

- Pemeliharaan rambu rusak ringan tahun 2025

Tabel 3.10

Jenis Pemeliharaan Rambu	Lokasi Koordinat	Foto Sampel
Banyak anak2	'-2.75222, 155.27244 Jalan Bakarung Selatan	
Berhenti	'-2.75304, 115.27926 Jalan Bakarung Selatan	

Simpang 3	'-2.73245, 115.29040 Jalan Bakarung Selatan	
Papan Nama Tabihi	'-2.77528, 115.28167 Karang Jawa	
Simpang 3	'-2.77549, 115.28162 Karang Jawa	
Informasi Mesjid	-2.78717, 115.28470 Karang Jawa	
Kapasitas 5 Ton	-2.80734, 115.28930 Jembatan Merah	
Berhenti	-2.80731, 115.28925 Jembatan Merah	

Papan Nama Padang Batung	-2.80728, 115.28920 Jembatan Merah	
Papan Nama Teluk Pinang Pahampangan	-2.81165, 115.26368 Jembatan Merah	

- Pemeliharaan Traffic Light tahun 2025

Tabel 3.11

No.	Jenis	Titik Koordinat	Keterangan
1	Traffic Light	'-2.7862174247758587, 115.26587053039515 Tugu Dodol Kandangan	

- Pemeliharaan Warning Light tahun 2025

Tabel 3.12

No.	Jenis	Titik Koordinat	Keterangan
1	Warning Light	'-2.780451650741597, 115.2619709712876 Kandangan	
2		'-2.7722145511890903, 115.25088632390596 2.773452950671602, 115.24945670648114 Kandangan	dan- 

3		'-2.7955188061000618, 115.26213486316873 Kandangan	
4		'-2.804013076185754, 115.25968788288868 Kandangan	
5		'-2.78868773352287, 115.26030670989215 SIMPANG 3 AMAWANG	
6		'-2.783896848663198, 115.2636667548325 SAMPING LANGGAR SIMPANG 5	
7		'-2.7840414862673764, 115.26352698313036 Samping Al Huda	

- Pengadaan rambu baru tahun 2025

Tabel 3.13

No.	Jenis	Titik Koordinat	Keterangan
1	RAMBU STOP	'-2.78534, 115.26787 Kandangan	

2	RAMBU HATI - HATI	'-2.78513, 115.26775 Kandangan	
3	RAMBU SIMPANG EMPAT	'-2.78509, 115.26772 Kandangan	
4	RAMBU STOP	'-2.78459, 115.26742 Kandangan	
5	RAMBU HATI - HATI	'-2.78473, 115.25750 Kandangan	
6	RAMBU SIMPANG EMPAT	'-2.78483, 115.26761	
7	RAMBU HATI - HATI	'-2.784931, 115.267603 Kandangan	

4. Monitoring dan Razia gabungan Penertipan Kendaraan Pengangkut Orang dan Barang.

Merupakan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap kelengkapan surat – surat administrasi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dan Penumpang seperti STNK / Pajak, SIM, Kopun Asuransi Jasaraharja dan Uji KIR / Laik Jalan serta fisik kendaraan bermotor yang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan instansi terkait seperti dari pihak Satlantas Polres H S S, Polisi Militer (PM), PT. Jasaraharja, Satpol PP dan

Dishub yang bertempat di lokasi Terminal Bis Jl. H.M. Yusi pada tanggal 04 Desember 2025 mulai jam 4 sore sampai selesai. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan masih banyak ditemukan unit jenis dump truck yang over dimensi dan over load. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terhadap kendaraan yang terindikasi over dimensi dan over load tidak diberikan tindakan penegakan hukum, melainkan hanya dilakukan sosialisasi dan imbauan kepada pengemudi maupun pemilik kendaraan agar ke depan dapat menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan persuasif ini dilakukan sebagai langkah awal pembinaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, dengan harapan pada kegiatan berikutnya tingkat pelanggaran dapat berkurang secara signifikan.

Gambar 3.5
Kegiatan Razia Gabungan Tahun 2025



5. Pelayanan Sungai dan Danau

Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan berada dibawah Bidang Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tugasnya meliputi pelayanan kapal peyeberangan gratis bagi pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau juga memiliki tugas memungut retribusi pelayanan kepelabuhan antara lain : retribusi masuk pelabuhan, retribusi

bongkar muat barang dan hewan, retribusi sandar kapal dan penggunaan arel sungai.

a) Layanan Ferry Penyeberangan

Terdapat kendala untuk keberlanjutan pelayanan karena sesuai sesuai peraturan, SKPD tidak diperbolehkan menambah tenaga kontrak baru dan tenaga kontrak yang usianya sudah melebihi batas maksimum tidak dapat diperpanjang kontraknya sehingga pada tahun depan layanan penyeberangan Jalur Baru - Tanjung selor dan Penyeberangan Bajayau Lama – Bajayau Tengah yang baru saja disediakan sarana prasaranya tidak dapat dioperasikan untuk itu ada 2 (dua) Opsi yang sedang diajukan ke Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan yaitu; Opsi 1; Pengajuan pekerja paruh waktu operator kapal dari outsourcing pihak ketiga. Opsi 2; kedua unit kapal Penyeberangan dihibahkan ke Pemerintah Desa sehingga pengoperasiannya mulai dari Tenaga Operator Kapal, Bahan Bakar dan Pemerliharaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Gambar 3.6
Layanan Penyeberangan Sungai dan Danau Tahun 2025

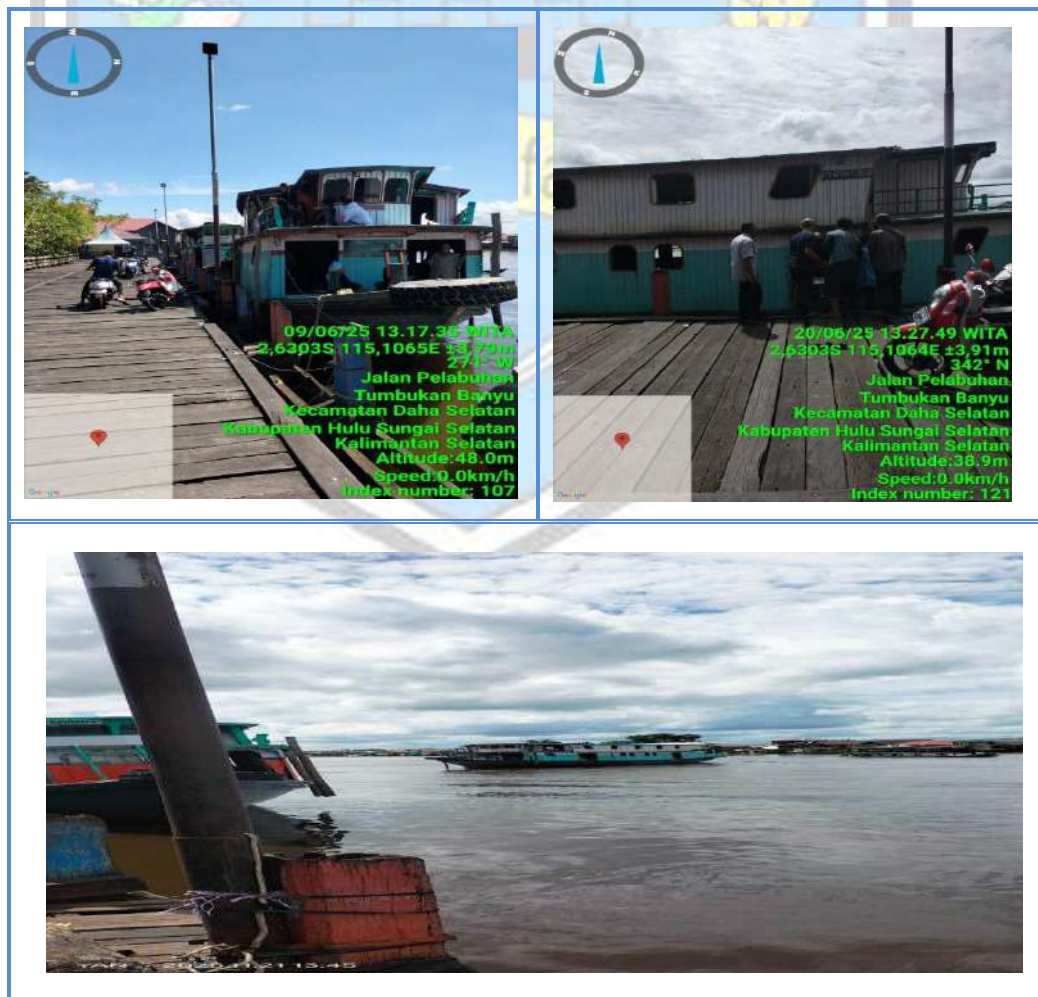


b) Layanan kepelabuhanan

Layanan kepelabuhanan di Tumbukan Banyu melayani kapal angkutan penumpang trayek Negara – Banjarmasin serta melayani bongkar muat barang dan hewan bagi masyarakat. Secara lebih rinci berikut ini jasa/layanan/perizinan yang disediakan Pelabuhan Tumbukan Banyu :

- 1) Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Sungai dan Danau;
- 2) Jasa Masuk Ke Pelabuhan;
- 3) Jasa Penggunaan Alur Sungai;
- 4) Jasa Tambat/ Sandar Kapal;
- 5) Kegiatan Bongkar Muat angkutan Barang di Dermaga;
- 6) Kendaraan Bermotor air (GT 063);
- 7) Parkir di Lingkungan Kerja Pelabuhan / Dermaga.

Gambar 3.7
Layanan Kepelabuhanan



EFESIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran per sasaran guna mendukung Sasaran Kinerja “Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan” dapat dilihat pada tabel 3.2.10 dibawah ini :

Tabel 3.14
Efisiensi per sasaran

Program Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya efektivitas penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi darat	Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai standar	696.269.172,-	471.582.672,-	1,47%
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	671.024.670,-	559.178.613,-	1,20%
Meningkatnya kepatuhan dan kelayakan operasional kendaraan dalam mendukung keselamatan transportasi	Presentase kendaraan laik jalan	183.858.000,-	118.128.950,-	1,55%
PROGRAM PELAYARAN				
Meningkatnya keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi sungai dan danau	Persentase Sarana Prasarana Transportasi sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan minimal	399.362.800,-	208.377.505,-	1,91%

Berdasarkan tabel efisiensi pada Program Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pelayanan, dapat disampaikan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh persentase efisiensi anggaran pada masing-masing indikator yang relatif kecil, berkisar antara 1,20% sampai dengan 1,91%, yang mengindikasikan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pada indikator *Meningkatnya efektivitas penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi darat*, tercatat efisiensi sebesar 1,47%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia, sementara target kinerja tetap dapat dicapai sesuai perencanaan. Efisiensi ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.

Selanjutnya, pada indikator *Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas*, efisiensi tercatat sebesar 1,20%. Persentase ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cermat, terutama dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan disiplin lalu lintas, sehingga output kegiatan tetap optimal dengan biaya yang lebih terkendali.

Untuk indikator *Meningkatnya kepatuhan dan kelayakan operasional kendaraan dalam mendukung keselamatan transportasi*, diperoleh efisiensi sebesar 1,55%. Capaian ini menunjukkan adanya penghematan belanja operasional maupun pendukung kegiatan uji kelayakan kendaraan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pada Program Pelayanan dengan indikator *Persentase Sarana Prasarana Transportasi sungai dan danau yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan minimal*, tercatat efisiensi sebesar 1,91%, yang merupakan efisiensi tertinggi di antara indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi dalam pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi pada seluruh indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pengendalian anggaran yang baik. Efisiensi yang dicapai tidak berdampak pada penurunan kualitas kinerja, melainkan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan tepat guna.

Sasaran 2 : MENINGKATNYA KINERJA SISTEM ANGKUTAN JALAN YANG HANDAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15

Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%	56,21%	100,05%

Capaian sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik** tercapai dengan predikat capaian **Melebihi Target** karena persentase capaian melebihi 100 % yaitu sebesar **100,05%**. Target tahunan jumlah penumpang layanan angkutan-meliputi Bus Sekolah Dinas Perhubungan, Bus Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta angkutan trayek/angkutan desa-ditetapkan sebanyak 36.252 penumpang. Target tersebut setara dengan 56,18% dari kapasitas angkut maksimal pertahun, yaitu 64.524 penumpang (dengan asumsi angkutan beroperasi penuh pada perjalanan pergi dan puiang). Untuk target capaian sampai bulan Desember, ditetapkan sebanyak 36.252 penumpang, atau 56,18% dari kapasitas maksimum pertahun ($64.524 \times 56,18\% = 36.252$). Realisasi total pelajar yang diangkut oleh Layanan Bus Sekolah Dinas Perhubungan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari bulan Januari hingga Desember mencapai 35.286 siswa, lebih lebih tinggi dari target tahunan yaitu 35.083 siswa. Sementara itu, realisasi jumlah penumpang angkutan trayek yang menerima layanan adalah sebanyak 983 penumpang hingga bulan Desember. Berdasarkan data bulan Desember, total penumpang dari ketiga jenis layanan angkutan tersebut sejak Januari hingga Desember 2025 berjumlah 36.269 penumpang, atau 56,21% ($36.269 / 64.524 \times 100\%$), sehingga target keseluruhan bulan Desember dan target Tahunan tercapai.

Berdasarkan Data Layanan Angkutan, Jumlah penumpang yang digunakan sebagai dasar perhitungan meliputi penumpang bus sekolah layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten HSS (2 unit), bus sekolah layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS (3 unit), serta penumpang angkutan trayek berupa angkutan desa yang masih aktif beroperasi (1 unit). Selain itu, karena Bus Sekolah beroperasi dengan banyak titik persinggahan, maka diasumsikan bahwa bus berangkat dan kembali dengan potensi kapasitas angkut penuh. Berdasarkan masukan dari Bapelitbangda serta Bagian Organisasi Setda, target pada PK Perubahan telah disesuaikan dengan memperluas komponen perhitungan. Komponen tersebut mencakup penambahan layanan Bus Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3 (tiga) unit serta layanan trayek Angkutan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih aktif beroperasi. Data jumlah penumpang pelajar diperoleh dari Bidang Manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten HSS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, sedangkan data angkutan trayek diperoleh dari ORGANDA Kabupaten HSS. Seluruh data tersebut dilaporkan dalam laporan Unit PKB Dinas Perhubungan Kabupaten HSS. Berikut disajikan data jumlah penumpang dari layanan angkutan yang menjadi komponen perhitungan, yaitu:

1. Data Penumbang Bus Sekolah Dinas Perhubungan

Layanan Bus Dinas Perhubungan memiliki dua rute, yaitu Kalumpang-Kandangan dan Angkinang-Kandangan dengan jumlah armada sebanyak 2 (dua) unit.

Berdasarkan data Penumpang Layanan Bus Sekolah Gratis Dinas Perhubungan, jumlah penumpang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Januari sebanyak 495 penumpang, Februari 805 penumpang, Maret 540 penumpang, April 832 penumpang, Mei 932 penumpang, Juni 666 penumpang, Juli 908 penumpang, Agustus 932 penumpang, September 955 penumpang, Oktober 867 penumpang, November 862 penumpang, dan Desember 761 penumpang. Dengan demikian, total penumpang dari Januari hingga Desember 2025 adalah 9.555 penumpang.

Tabel 3.16

Rekap Jumlah Penumpang Bus Sekolah Layanan Dinas Perhubungan

No	Bulan	Jumlah Penumpang
1	Januari	495
2	Februari	805

3	Maret	540
4	April	832
5	Mei	932
6	Juni	666
7	Juli	908
8	Agustus	932
9	September	955
10	Oktober	867
11	Nopember	862
12	Desember	761
TOTAL		9.555

Sumber : Dinas Perhubungan

2. Data Penumbang Bus Sekolah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS

Layanan Bus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiiliki tiga rute, yaitu Kandangan-Padang Batung, Kandangan-Sungai Raya, dan Kandangan-Bangkau, dengan jumlah armada sebanyak 3 (tiga) unit dan kapasitas masing-masing 29 penumpang. Jumlah pelajar yang diangkut oleh layanan bus tersebut dari bulan Januari hingga Desember 2025 adalah sebanyak 25.296 penumpang.

Tabel 3.17
Rekap Jumlah Penumpang Bus Sekolah Layanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Bulan	Jumlah Penumpang
1	Januari	1367
2	Februari	2047
3	Maret	1473
4	April	2116
5	Mei	2369
6	Juni	1694
7	Juli	2309
8	Agustus	2370
9	September	2329

10	Oktober	2363
11	Nopember	2668
12	Desember	2191
TOTAL		25.296

Sumber : Dinas Perndidikan dan Kebudayaan Kab. HSS Bulan Desember

3. Data Penumbang Angkutan Trayek (Angkutan Desa)

Armada angkutan desa yang masih aktif beroperasi hingga saat ini hanya satu (1) unit pada rute Kandangan-Loksado dengan kapasitas 10 penumpang. Jumlah penumpang angkutan pada trayek tersebut dari bulan Januari hingga Desember 2025 adalah sebanyak 983 penumpang.

Tabel 3.18
Rekap Jumlah Penumpang Trayek Angkutan Desa Kab. HSS

No	Bulan	Jumlah Penumpang
1	Januari	79
2	Februari	71
3	Maret	74
4	April	83
5	Mei	82
6	Juni	78
7	Juli	77
8	Agustus	83
9	September	75
10	Oktober	77
11	Nopember	90
12	Desember	114
TOTAL		983

Sumber : Laporan PKB dan Organda Kab HSS Bulan Desember

a. Perbandingan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Hasil pengukuran pada indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator kinerja tahun 2025 ini adalah indikator baru yang sebelumnya belum digunakan sehingga tidak ada data pembanding yang sama.

b. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2029

Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra maka capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target tahun akhir renstra 2029
Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56,18%	56,21%	58,07%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian indikator telah mencapai 56,21%, melampaui target awal tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 56,18%. Meskipun selisihnya relatif kecil, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta mampu memenuhi bahkan sedikit melebihi target yang direncanakan pada tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 58,07%, maka posisi capaian tahun 2025 telah berada pada jalur yang positif dan progresif. Dengan capaian 56,21%, selisih terhadap target akhir Renstra hanya sebesar 1,86%, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja saat ini telah mendekati sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi, kebijakan, dan intervensi program yang dilaksanakan sudah berada pada arah yang tepat.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

1. Optimalisasi Operasional Layanan Angkutan.
- Pengaturan jadwal operasional bus sekolah dan angkutan trayek yang lebih terencana serta tingkat keterisian penumpang yang stabil turut meningkatkan jumlah pengguna layanan secara konsisten hingga akhir tahun.
2. Sinergi Antar Perangkat Daerah.
- Koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung layanan bus sekolah, termasuk penyesuaian

- rute dengan kebutuhan sekolah, mendorong peningkatan jumlah pelajar yang memanfaatkan layanan.
3. Tingginya Kebutuhan Transportasi Pelajar.
Layanan bus sekolah menjadi alternatif transportasi yang aman, terjangkau, dan membantu meringankan beban orang tua, sehingga tingkat pemanfaatannya relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun ajaran.
 4. Keandalan Armada dan Pengemudi.
Ketersediaan armada yang layak jalan, didukung pengemudi yang disiplin dan bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan yang disediakan pemerintah daerah.
 5. Pendekatan Pelayanan Publik yang Berorientasi pada Masyarakat.
Pelayanan yang lebih responsif, termasuk penyesuaian waktu dan rute berdasarkan kebutuhan, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penumpang serta tercapainya target tahunan.

FAKTOR PENGHAMBAT

1. Ketidakpastian Jadwal Operasional
masih terdapat kendala ketepatan waktu keberangkatan dan kepulangan, terutama pada layanan bus sekolah, yang dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan konsistensi penggunaan oleh pelajar.
2. Fluktuasi Jumlah Penumpang
Jumlah penumpang tidak selalu stabil setiap bulan, dipengaruhi oleh hari libur sekolah, kegiatan akademik, maupun faktor cuaca, sehingga berpotensi menurunkan tingkat keterisian armada pada periode tertentu.
3. Persaingan dengan Transportasi Pribadi
Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat, terutama sepeda motor, menjadi tantangan dalam meningkatkan minat penggunaan angkutan umum.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Peningkatan Ketepatan Jadwal Operasional
Menyempurnakan sistem pengaturan jadwal keberangkatan dan kepulangan, termasuk penyusunan SOP yang lebih tegas bagi pengemudi, agar layanan lebih tepat waktu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Penyesuaian Rute Berdasarkan Kebutuhan
Melakukan survei dan pemetaan wilayah secara berkala untuk memastikan rute bus sekolah dan angkutan trayek sesuai dengan sebaran pelajar maupun pusat aktivitas masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Memberikan pembinaan kepada pengemudi terkait pelayanan prima, keselamatan berkendara, serta etika pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan pengguna jasa.
4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Mengintensifkan sosialisasi manfaat penggunaan angkutan umum, khususnya bus sekolah gratis, agar minat masyarakat terus meningkat dan ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan.

Gambar. 3.8
Kegiatan Layanan Bus Sekolah Gratis





PROGAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEBERHASILAN

Untuk mendukung Sasaran Kinerja **Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik**, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.20
Program Pendukung Capaian Kinerja

Program Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat	1,26%	1,26%	100%

Meningkatnya kelayakan dan kenyamanan fasilitas terminal dalam mendukung pelayanan transportasi darat	Presentase terminal Tipe C yang layak	40%	40%	100%

KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN SASARAN

Salah satu program/kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis 2 yaitu *Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik* adalah **kegiatan pemeliharaan terminal**.

Pemeliharaan terminal dilaksanakan guna memastikan seluruh fasilitas utama dan penunjang dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan oleh masyarakat, selain itu juga pemeliharaan terminal dilakukan guna mendukung kegiatan penilaian Adipura yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Kegiatan ini meliputi perawatan bangunan terminal, ruang tunggu penumpang, area parkir, fasilitas sanitasi, penerangan, marka dan rambu, serta penataan lingkungan terminal agar tetap bersih dan tertib. Dengan kondisi terminal yang terpelihara, kenyamanan dan keamanan pengguna jasa angkutan umum dapat terjaga.

Gambar. 3.9
Kegiatan Pemeliharaan Terminal





EFESIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran per sasaran guna mendukung Sasaran Kinerja “Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan” dapat dilihat pada tabel 3.2.10 dibawah ini :

Tabel 3.21
Efisiensi per sasaran

Program Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat	346.692.000,-	289.271.676,-	1,19%
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	25.900.000,-	25.832.376,-	1%

Berdasarkan tabel efisiensi pada Program Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan tingkat efisiensi yang tetap menjaga kualitas capaian kinerja.

Pada indikator *Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman*, tercatat efisiensi sebesar **1,19%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih rendah dari pagu yang direncanakan, sementara realisasi kinerja tetap tercapai sesuai target. Efisiensi ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan pelayanan, serta pemanfaatan sarana prasarana yang sudah tersedia secara maksimal tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.

Selanjutnya, pada indikator *Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas*, diperoleh efisiensi sebesar **1%**. Persentase ini mencerminkan adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penertiban lalu lintas. Pengendalian belanja operasional serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait turut mendukung tercapainya target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi pada kedua indikator menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas anggaran. Efisiensi yang dicapai bukan karena pengurangan kualitas kegiatan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang, pengawasan pelaksanaan yang baik, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pada Program LLAJ dapat dinilai berjalan secara tepat guna dan bertanggung jawab.

Sasaran 3 : ANALISIS CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai tertera pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.22

Meningkatnya kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	100%	100%

Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat persepsi dan penilaian positif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja yang menangani urusan internal (Sekretariat).

Indikator *Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah* menunjukkan capaian sebesar **100%** dari target **100%**, sehingga tingkat pencapaian kinerja berada pada kategori sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan internal yang diberikan kepada ASN Dinas Perhubungan telah berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelayanan internal tersebut meliputi layanan administrasi umum, layanan kepegawaian, layanan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan dan penyediaan kelengkapan aset yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Terpenuhinya seluruh aspek layanan tersebut secara tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan pegawai. Capaian ini juga menunjukkan bahwa sistem tata kelola internal telah berjalan efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Pelayanan internal dilakukan untuk seluruh ASN di lingkungan Dinas Perhubungan, yang mencakup 4 (empat) pilar utama:

a. Layanan Administrasi Umum

- Ketepatan Persuratan : Kecepatan dan ketepatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.
- Tata Kelola Kearsipan : Kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen dinas.
- Fasilitasi Rapat/Kegiatan : Kualitas dukungan akomodasi dan sarana prasarana saat kegiatan kedinasan.

b. Layanan Kepegawaian

- Administrasi Karir : Pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), dan pensiun.
- Pengembangan SDM : Transparansi dan kemudahan akses informasi terkait diklat (pendidikan dan pelatihan).
- Kesejahteraan : Pengelolaan absensi, cuti, dan hak-hak pegawai lainnya.

c. Layanan Keuangan

- Ketepatan Waktu Pembayaran: Kelancaran pembayaran gaji, tunjangan kinerja (TPP), dan honorarium.

- Pertanggungjawaban Keuangan: Kemudahan koordinasi dalam penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan.
- Transparansi Anggaran: Kejelasan prosedur pengajuan biaya operasional.

d. Layanan Kelengkapan Aset

- Sarana Prasarana Kerja: Ketersediaan dan kelayakan alat tulis kantor (ATK), komputer, dan printer.
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas: Kesiapan dan kondisi teknis kendaraan operasional untuk tugas lapangan.
- Fasilitas Gedung: Kebersihan, kenyamanan ruang kerja, dan ketersediaan fasilitas penunjang lainnya.

3.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP merupakan dokumen yang berisi simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah / unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut ini :

Tabel 3.23
Matriks Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Akip Internal Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas perjenjangan kinerja berorientasi pada hasil sesuai dengan levelnya dengan tetap memperhatikan logical framework serta CFS yang ada pada pohon kinerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan yang disusun efektif dan efesien dalam mencapai tujuan dan sasaran.	Penyusunan Pohon Kinerja yang dipandu oleh Tim SAKIP Kabupaten agar dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran pada Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 dan tentunya memenuhi kriteria <i>SMART</i> . Terkait <i>crosscutting</i> untuk <i>sharing outcome</i> antar Perangkat Daerah termuat dalam Pohon Kinerja Kabupaten Hulu sungai Selatan secara Tematik	Pohon Kinerja 2025 - 2029	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025 (evaluasi dilakukan setiap triwulan).	Kepala Dinas, Sekretaris, dan semua Kepala Bidang	Telah Terlaksana

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
2	Memastikan setiap rincian anggaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program sudah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.	Melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan program, menyusun indikator kinerja yang terukur, meningkatkan pengawasan internal terhadap realisasi fisik dan keuangan, serta melakukan rapat koordinasi rutin untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dan target kinerja	Dokumen RKA dan DPA	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025 (evaluasi dilakukan setiap triwulan).	Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.	Telah terlaksana
3	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memastikan proses input terhadap realisasi rencana aksi sesuai dengan timeframe yang sudah ditetapkan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik (bulanan/triwulanan), menetapkan jadwal input laporan realisasi rencana aksi yang terstruktur, memberikan pengingat kepada penanggung jawab kegiatan, serta melakukan verifikasi dan validasi data sebelum pelaporan.	Aplikasi E Sakip	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretaris Dinas melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, serta seluruh Kepala Bidang sebagai penanggung jawab kegiatan.	Telah Terlaksana

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
4	Melakukan reviu dan perbaikan terhadap target kinerja setiap triwulan terutama pada level taktikal dan operasional melalui E-SAKIP sehingga setiap capaian kinerja triwulan dapat menunjukkan dan mencerminkan progress pencapaian kinerja.	Melaksanakan reviu target kinerja dan indikator pada level taktikal dan operasional setiap triwulan melalui aplikasi E-SAKIP.	Aplikasi E Sakip	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretaris Dinas melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, serta seluruh Kepala Bidang sebagai penanggung jawab kegiatan	Telah Terlaksana
5	Menambahkan informasi yang memadai tentang peranan pihak-pihak lain diluar organisasi yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi.	mendokumentasikan peran serta kontribusi pihak eksternal (instansi vertikal, perangkat daerah terkait, pihak swasta, dan masyarakat) dalam setiap program/kegiatan, serta mencantumkannya secara sistematis dalam dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi.	Dokumen renja tahun 2025	Januari - Desember 2025	Sekretaris dan semua Kepala Bidang , serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Telah Terlaksana

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
6	Menambahkan informasi yang jelas tentang inovasi yang mendukung kinerja (apa, bagaimana dijalankan dan manfaatnya).	Penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan LKPJ	Dokumen LKPJ dan LKJIP	November-Desember 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, dan semua Kepala Bidang	Telah Terlaksana
7	Menambahkan informasi jumlah dan karakteristik responden untuk survey kepuasan Masyarakat.	Menyempurnakan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan mencantumkan jumlah responden, metode pengambilan sampel, serta karakteristik responden (jenis kelamin, usia, pekerjaan, domisili, dan jenis layanan yang diterima), serta memastikan data terdokumentasi dengan baik	Bab IV LKJIP	Maret 2025	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Telah Terlaksana

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
8	Meningkatkan sosialisasi laporan kinerja pada seluruh karyawan secara berkala.	Melaksanakan sosialisasi laporan kinerja melalui rapat internal dan forum koordinasi, serta memastikan seluruh pegawai memahami capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut kinerja organisasi.	Inputan pada Aplikasi E-Sakip HSS	Januari - Desember 2025	Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan seluruh Kepala Bidang	Telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan
9	Memberikan penghargaan kepada karyawan berkinerja terbaik sebagai salah satu cara meningkatkan implementasi budaya berkinerja	Telah memasukan pada rencana aksi Budaya Kerja ASN BerAkhlak untuk melaksanakan pemberian penghargaan kepada karyawan berkinerja terbaik	Terselenggaranya pemberian penghargaan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran serta meningkatnya	November - Desember 2025	Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan Subbag Kepegawaian.	Belum terlaksana

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
			motivasi dan disiplin pegawai dalam mencapai target kinerja.			
10	Mengoptimalkan tindak lanjut oleh PD terhadap catatan baik temuan ataupun rekomendasi LKE internal melalui aplikasi E-SAKIP sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja Tingkat PD dan diharapkan berpengaruh juga pada level pemerintah daerah.	Melakukan inventarisasi seluruh temuan dan rekomendasi LKE internal, menetapkan rencana aksi tindak lanjut beserta batas waktu penyelesaian melalui aplikasi E-SAKIP, melakukan monitoring berkala atas progres penyelesaian, serta melaporkan hasil tindak lanjut dalam forum evaluasi kinerja PD.	Aplikasi E Sakip	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2025	Sekretaris dan semua Kepala Bidang , serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Telah dilaksanakan

Sumber : LHE Tahun 2024

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan jumlah anggaran yang tersedia tahun 2025 sebesar Rp. 2.297.206.642,00,- dengan realisasi anggaran tahun 2025 seperti pada tabel Tabel. 3.23 berikut ini :



Tabel. 3.24
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM :PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	1.897.843.842	1.438.161.911	459.681.931	76%
KEGIATAN :penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupatenkota	63.974.500	45.382.812	18.591.688	71%
SUB KEGIATAN :penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan llaj kabupatenkota	63.974.500	45.382.812	18.591.688	71%
KEGIATAN :penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatenkota	497.875.200	356.580.260	141.294.940	71%
SUB KEGIATAN :penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupatenkota	43.690.200	34.436.000	9.254.200	79%
SUB KEGIATAN :rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	454.185.000	322.144.260	132.040.740	71%
KEGIATAN :pengelolaan terminal penumpang tipe c	25.900.000	25.832.376	67.624	99%
SUB KEGIATAN :rehabilitasi dan pemeliharaan terminal fasilitas utama dan pendukung	25.900.000	25.832.376	67.624	99%
KEGIATAN :penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	134.419.472	69.619.600	64.799.872	51%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
SUB KEGIATAN :fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupatenkota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	134.419.472	69.619.600	64.799.872	51%
KEGIATAN :pengujian berkala kendaraan bermotor	183.858.000	118.128.950	65.729.050	64%
SUB KEGIATAN :penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	94.858.000	39.553.950	55.304.050	41%
SUB KEGIATAN :pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	75.000.000	68.700.000	6.300.000	91%
SUB KEGIATAN :monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	14.000.000	9.875.000	4.125.000	75%
KEGIATAN :pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupatenkota	671.024.670	559.178.613	111.846.057	83%
SUB KEGIATAN :forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupatenkota	122.688.670	103.773.250	18.915.420	84%
SUB KEGIATAN :penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupatenkota	548.336.000	455.405.363	92.930.637	83%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
KEGIATAN :Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.792.000	263.439.300	57.352.700	82%
SUB KEGIATAN :Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.792.000	263.439.300	57.352.700	82%
PROGRAM :PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	399.362.800	208.377.505	190.985.295	52%
KEGIATAN :pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	399.362.800	208.377.505	190.985.295	52%
SUB KEGIATAN :pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	399.362.800	208.377.505	190.985.295	52%
JUMLAH	2.297.206.642	1.646.539.416	650.667.226	71%

Sumber Data : Laporan Monev Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2025 sebesar Rp. 1.646.539.416,00,- dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.297.206.642,00,- atau 71%. Untuk perbandingan target anggaran dan realisasi program tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik 3.2 berikut:

Grafik. 3.2
Target Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025



Sumber Data : Laporan Monev Dinas Perhubungan Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Capaian Kinerja triwulan IV tahun 2025 sebagai cerminan dari hasil kinerja selama 1 (satu) tahun yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Dengan Laporan Capaian Kinerja tahun anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos., M.IP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19691003 199103 1 005

LAMPIRAN

PK KEPALA DINAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025
Pihak Pertama

H. TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP
NIP. 196910031991031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	0.61 Indeks
2	Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF)	56.18 %
3	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %

PROGRAM	ANGGARAN
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.591.425.977,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 1.897.843.842,00
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 399.362.800,00


H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Oktober 2025
 Pihak Pertama

H. TAHDON NOOR, S.Sos, M.IP
 NIP. 196910031991031005





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Aluh Idut No.58 Kandangan (71212)
Telp No. (0517) 21037 Faks No. (0517) 21037
Website [http : // dishub.hulusungaiselatankab.go.id](http://dishub.hulusungaiselatankab.go.id)
E-Mail : dishub.hulusungaiselatan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (BD.2020/No.89);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 71)
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 04).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 06 Oktober 2025

Kepala Dinas Perhubungan,



TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19811217 200012 1 004



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN

NO	SASARAN		FORMULASI / PENJELASAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi kinerja jaringan jalan	Indeks Rata-Rata Kinerja Ruas Jalan	VC ratio atau Volume Capacity Ratio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan, analisa ini digunakan untuk menilai apakah kapasitas jalan sudah cukup untuk menampung volume lalu lintas yang ada. Pada perhitungan rata-rata V/C Ratio dipilih 10 ruas jalan dengan performa terburuk dari 30 Ruas jalan yang menjadi sampel pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 IKK Outcome Urusan Perhubungan V/C Ratio Ruas Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rumus rata-rata V/C ratio adalah sebagai berikut : Rumus : $\bar{x}V/C = \frac{\bar{x}V}{\bar{x}C}$ Keterangan : $\bar{x}V/C$: Indeks rata-rata kinerja ruas jalan Sampel $\bar{x}V$: Rata-Rata Volume Lalu Lintas dari Ruas jalan Sampel $\bar{x}C$: Rata-Rata Kapasitas Jalan dari Ruas jalan Sampel	Dengan dilaksanakannya Program dan Kebijakan oleh Dinas Perhubungan dapat menekan kenaikan angka Indeks VC Ratio pada ruas jalan yang dijadikan sampel	Kepala Dinas Perhubungan, didukung capaian Kinerja Kabid Manajemen Transportasi dan Kabid Keselamatan Sarana Dan Prasarana Transportasi





2	Meningkatnya kinerja sistem angkutan jalan yang handal dan berorientasi pada pelayanan publik	Persentase Kinerja Angkutan Jalan (L.F)	Kinerja angkutan jalan adalah kemampuan angkutan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas dapat juga diartikan sebagai hasil kerja angkutan dalam melayani penumpang. Jumlah penumpang yang menjadi angka perhitungan adalah penumpang angkutan bus sekolah layanan Dinas Perhubungan Kab. HSS (2 unit) dan Bus sekolah layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS (3 unit), angkutan trayek berupa angkutan desa yang masih aktif beroperasi (1 unit), dengan perhitungan sebagai berikut : $\text{Kinerja Angkutan Jalan \%} = \frac{\text{Jumlah Penumpang yang diangkut}}{\text{kapasitas maksimum angkut kendaraan}} \times 100 \%$	Dengan dilaksanakannya Program dan Kebijakan oleh Dinas Perhubungan serta kerjasama lintas sektor dengan ORGANDA dan OPD terkait dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan pelajar dan angkutan desa	Kepala Dinas Perhubungan, didukung capaian kinerja Kabid Manajemen Transportasi , serta kerjasama lintas sektor terutama dengan ORGANDA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS
---	---	---	--	--	---

Hulu Sungai Selatan, 06 Oktober 2025
Kepala Dinas Perhubungan,



TAJIDDIN NOOR, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199103 1 005